

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir Muhamad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Apeldoorn, Cetakan ke-XXV, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bogdan dan Taylor, 1975, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remadja Karya, Bandung.

Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta.

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Djaja.S.Meliala, 2014, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Redaksi Nuansa Aulia, Bandung.

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

E Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat Dan Antinomi Nilai)*, PT. Kompas, Jakarta.

E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Baru Pers, Yogyakarta.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.

Efa Laela Fakhriah, 2020, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, PT.Alumni, Bandung.

Fitzgerald, diterjemahkan oleh Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Gustav Radbruch, 1982, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung.

_____, diterjemahkan Satjipto Rahardjo, Cetakan ke-1, 2006, *Hukum Dalam Jaga Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.

Huberman dan Miles, 1984, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, Jakarta.

Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung..

_____, 2009, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.

_____, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Jakarta.

Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Bandung.

_____, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Media Indonesia, Jakarta.

HR.Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya, hlm.143.

Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jan Michael Otto, diterjemahkan Tristam Moelino, 2013, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.

Johny Ibrahim, 2009, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.

Leny Agustan dan Khairulnas, 2018, *Tata Kelola Kantor Notaris/PPAT*, UII Press, Yogyakarta.

Lili Rasjidi dan B, Arief Sidharta, 2004, *Filsafat Hukum*, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Lon L. Fuller, 1964, *The Morality Of Law*, Mc Graw-Hill, Yale University Press, Washington.

Moh. Nazir, 2011, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, PT.Madza Media, Surakarta.

Muhammad Djumhana, 1996, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, PT.Griya Media, Salatiga.

Paulus Effeni latolun, 2003, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*, Mestika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Pipin Syarifin, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.

Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung.

R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notaris Di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

R. Soeroso, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Rusdianto Sesung, 2020, *Tafsir, Penjelasan & Komentar Undang-Undang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sjaifurrachman. 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soetiono, 2018, *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Depok.

_____, 2019, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, PT.Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Surakarta.

Subekti., 1980. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

_____, 2019, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka , Yogyakarta.

Tan Thoeng Kie, 2007, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar, Jakarta.

Yahya Harahap, 2016, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 49/PUU-X/2013.

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 347/Pdt.G/2020/PN Btm.

C. KAMUS

Fokema Andrea, 1977, *Kamus Istillah Hukum Belanda-Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.

M. Marwan & Jimmy P, Cetakan ke-I, 2009, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya.

D. JURNAL

Alifah Sarah Yunita, Volume 3, Nomor 1, 2020, "Kedudukan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Perkara Melibatkan Notaris dalam Persidangan", Artikel Notaire, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Anita Afriana, Volume 6, Nomor 2, 2020, "Kedudukan Pegawai Notaris Sebagai Saksi Dalam Akta Autentik Pada Proses Penyidikan dan Peradilan Ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris", Adhaper, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.

Fakta Andony, Volume 6, Nomor 2, 2020, “Kedudukan Pegawai Notaris Sebagai Saksi dalam Akta Otentik pada proses Penyidikan dan Peradilan ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris”, Artikel Jhaper, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jatinangor.

Farah Dita Nuari Maqfira, Volume 2, Nomor 3, 2017, “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Setelah Pensiun Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya”, Jurnal Perspektif Hukum, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Frans Seyogie, Volume 23, Nomor 1, 2017, “Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi Dalam Teks Hukum Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010”, E-Journal UII Jakarta, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UII Jakarta, Jakarta.

Glory Bastian, Volume 3, Nomor 2, “Kewajiban Saksi Instrumentair dan Akibat Hukumnya Terhadap Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Notaris”, Digital Repository Jember University, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.

Hanna Natshasya Rumia Hutapea, Volume 8, Nomor 2, 2016, “Kedudukan Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta Notaris Dalam Hukum Nasional”, The University Institutional Repository Journal, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Imam Safi'i, Volume 2, Nomor 1, 2019, “Tanggung Jawab Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasiaan Akta”, Jurnal Ress Judicata, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya.

Jaka Mulyata, Volume 2, Nomor 1, “Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, Jurnal UNS, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Juli Maria, 2017, Volume 3, Nomor 2, 2020, “Hubungan Hukum Antara Notaris Dengan Staf Notaris”, Narotama University Electonic Journal, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya.

Lidia Margaret Sinaga, Volume 2, Nomor 2, 2021, “Tanggung Jawab Notaris dan Pegawai Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta”, Artikel Visi Sosial Humaniora, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Liha Solihatunnisa, Volume 5, Nomor 4, 2023, “Urgensi Perlindungan Hukum bagi Pegawai Notaris Sebagai Saksi Atas Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik”, Law Review Journal, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta.

Liza Dwi Nanda, Volume 2, Nomor 1, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris Yang Aktanya Menjadi Objek Perkara Pidana Di Pengadilan”, Premise Law Journal, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Mohamad Deni Silmi, Volume 1, Nomor 1, 2017, “Tanggung Jawab Saksi Instrumenter Dalam Hal Membocorkan Kerahasiaan Isi Akta Notaris”, Universitas Brawijaya Journal, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Puteri Chintami Oktavianti, Volume 6, Nomor 5, 2021, “Kedudukan Saksi Instrumenter dalam Merahasiakan Akta Otentik dan Perlindungan Hukum bagi Saksi Instrumentair”, Jurnal Ilmiah Indonesia, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Pontianak.

Putu Putri Nugraha, Volume 10, Nomor 7, 2022, “Perlindungan Hukum Pegawai Notaris Sebagai Saksi Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Terkait Kerahasiaan Akta Otentik”, Jurnal Kertha Semaya, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

Saristha Natalia Tuage, Volume 2, Nomor 2, 2013, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban”, Jurnal Lex Crime, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.

E. INTERNET

Afnizar, "*Kedudukan Akta Autentik Notaris sebagai Alat Bukti Menurut Pasal 1886 KUHPerdara*, <https://mkn.usu.ac.id>", diakses pada tanggal 1 Februari 2024, Talenta Publisher, Medan.

Hakmi Kurniawan, 2020, "*Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan*, <http://wordpress.com/2011/03/akta-otentik-dan-akta-di-bawah-tangan.html>", diakses pada tanggal 2 Februari 2024, Wordpress, Jakarta.

Letezia Tobing, 2016, "*Prosedur Jika Terdapat Kesalahan dalam Akta Notaris*, <https://www.hukumonline.com>", diakses pada tanggal 1 Maret 2024, Hukum Online, Jakarta.

Nur Hasan Ismail, 2007, "*Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik, Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum*, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/35-Herowati>", diakses pada tanggal 14 Maret 2024, Ngobrol Hukum, Jakarta.

Reny Rawasita Puspita, 2023, "*Tinjauan Yuridis Saksi Instrumentair Dalam Akta Notariil*, <https://RenyRawasitaPuspita.blog.net>", diakses pada tanggal 1 April 2024, Digital Repository Universitas Jember, Jember.

